

**Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Pengendalian Interen Akuntansi dan Good Corporate Governance Terhadap
Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah
(Studi Empiris Pada 32 Satuan Kerja di Polda Jambi)**

Aditya Rachman Prasetyo¹⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi,

ABSTRACT

This research aims is to know factors that influence information value of regional work unit's financial reporting. Information value refers to reliability and timeliness, whereas factors that influence are human resource capacity, information technology utilization, Good Corporate Governance, and accounting intern control. Respondents were the Chief of some office in Polda Jambi. Out of 96 questionnaires distribution, 80 usable responses were gathered. Data Wet analysed by SPSS program in 21.0 Version. The statistic method used to test the hypotheses was multiple linier regression. Hypotheses testing results are as follows. First, information technology utilization, Good Corporate Governance, and accounting intern control have a positive and significant influence on reliability of local government financial reporting, while human resource capacity has no influence. Second, human resource capacity, Good Corporate Governance, and information technology utilization have positive and significant influence on timeliness of local government financial reporting

Keywords : *Local government financial reporting, Information value, Human resource capacity, Information technology utilization Accounting intern control, and Good Corporate Governance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan Polda Jambi. Nilai informasi tersebut meliputi keterandalan dan ketepatanwaktuan, dimana faktor yang mempengaruhi adalah kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan Good Corporate Governance. Responden dalam penelitian ini adalah kepala urusan keuangan dan staf bagian keuangan pada 32 Satuan Kerja di Polda Jambi. Dari 96 kuesioner yang dibagikan, diperoleh 80 responden yang dapat dimasukkan dalam pengolahan data. Analisis data menggunakan program SPSS versi 21.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan Good Corporate Governance mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah sedangkan kapasitas SDM tidak berpengaruh. Kedua, baik kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan Good Corporate Governance mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan satker Polda Jambi.

Kata Kunci : Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah, kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan *Good Corporate Governance* .

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan yang menyajikan informasi dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah, rakyat, pemegang saham, penanam modal dan kreditur untuk pengambilan keputusan-keputusan yang harus dilakukan dengan cepat berdasarkan informasi yang memadai.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam mardiasmo, 2006). Sesuai amanat undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga wajib menyusun laporan keuangan.

Salah satu tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan yang menyangkut posisi keuangan, yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Informasi yang relevan memenuhi karakteristik : (a). Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), (b) Memiliki manfaat prediktif (*prdictive value*), (c) Tepat waktu, dan (d) Lengkap. Informasi yang andal memiliki karakteristik : (a) Penyajian jujur, (b) Dapat, (c) diverifikasi, (d) Netralitas. Dapat dibandingkan atau keterbandingan merupakan kemampuan informasi untuk dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya (perbandingan internal) atau laporan keuangan periode pada umumnya (perbandingan eksternal). Dapat dipahami atau keterpahaman adalah kemampuan informasi untuk dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta

batas istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Pemerintah. Beberapa tulisan yang berhasil dihimpun adalah :

1. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan kementerian dan lembaga (K/L) dan pemda tersebut belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemahnya sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku, dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan.
2. Ketua badan pemeriksa keuangan (BPK) Anwar Nasution menilai laporan keuangan Pemerintah banyak yang bermasalah bahkan tidak layak audit. Anwar nasution menyebutkan, permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah dengan boros yang tidak jelas keperluannya. Anwar Nasution juga mengkritik akuntabilitas transparansi laporan keuangan pemda masih sangat rendah.
3. Anggota IV BPK Ali Masykur Musa, mengatakan hampir seluruh kementerian terlambat melakukan penyetoran pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara. "Seluruh data harusnya dilaporkan," ungkapnya kepada Republika, Laporan pemeriksaan keuangan KKP 2010, menurut Ali, masih ditemukan dua kelemahan. Pertama, kelebihan anggaran belanja, kas bendahara, dan belum optimalnya pelaporan serta pencatatan sisa aset di Kementerian Pertanian (Kementan). Kedua, ketidakpatuhan entitas KKP terhadap peraturan perundang-undangan, seperti keterlambatan penyetoran PNPB, dan kelebihan anggaran perjalanan dinas.
4. Menurut Hadi dalam Pemeriksaan BPK terhadap 78 laporan keuangan kementerian/ lembaga (LKKL) menemukan 477 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 650 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 4,98 triliun. Selama pemeriksaan, temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara Rp 40 miliar.

5. Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan K/L dan pmda tersebut belum memperoleh opini WTP adalah karena penyajian yang belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), lemahnya sistem pengendalian intern, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku, dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memuat nilai informasi yang memiliki nilai atau manfaat sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Seperti kriteria keterandalan dan ketepatan waktu yang belum terpenuhi padahal ketepatan waktu pelaporan selain berkaitan dengan dasar penyusunan anggaran untuk periode berikutnya. Mengingat bahwa keterandalan dan ketepatan waktu merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, peneliti tertarik untuk meneliti hal apa yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah khususnya di Polda Jambi.

Penelitian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Dinata (2004) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah kota Palembang belum sepenuhnya dinyatakan siap atas berlakunya sistem akuntansi keuangan daerah yang berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 Dinata,(2004). Penelitian Alibudidiono dan Fidelis (2004) memberikan temuan empiris bahwa pegawai belatar belakang pendidikan akuntansi subbagian akuntansi pemerintahan XYZ masih minim, *Job description*-nya belum jelas, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan baik belum dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Santiadji Mustofa dkk menemukan bukti empiris bahwa kapasitas SDM berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan keterandalan pelaporan keuangan.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2008) menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu

pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ini juga sesuai dengan penelitian Desi dan Ertambang (2008), Dahny (2010) dan Faristina (2011). Seperti kita ketahui bahwa dari tahun ketahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan Sugijanto (2002). Untuk itu pemerintah saat ini telah membangun dan mengembangkan teknologi informasi yang dikenal dengan sistem akuntansi instansi yang digunakan oleh setiap instansi dan lembaga pemerintah dalam mempermudah kegiatan keuangan. Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyimpanan pelaporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocesing* Wahana Kaomputer, (2003), namun pengimplementasian teknologi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumberdaya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi Mahmudi, (2007). Penelitian oleh Zuliarti (2008) memberikan temuan empiris bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif

signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal keempat yang mungkin dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah Penerapan Good Corporate Governance (GCG). Penelitian R. Ait Novatiani dan Jeanny Fatimmah dalam pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap keandalan laporan keuangan memberikan temuan empiris bahwa GCG berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan. Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua stakeholders. Good Corporate Governance (GCG) juga menekankan pentingnya hak stakeholders untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder YPPMI & SC, (2002). Sehingga prinsip corporate Governance tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini membatasi pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan yaitu: pertama, pengendalian intern akuntansi lebih menitikberatkan fokus terhadap keterandalan karena pengendalian intern akuntansi bertanggung jawab atas hasil pelaporan keuangan yang dapat lebih dipercaya. Ketersediaan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten didukung oleh pengendalian yang baik akan meningkatkan keterandalan laporan keuangan. Namun demikian, ketepatan waktu laporan keuangan lebih ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan faktor lainnya. Pengendalian intern akuntansi dirasakan kurang memberikan kontribusi terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Kedua, beberapa penelitian terdahulu mendukung bahwa pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Ketiga, penelitian sebelumnya yang dijadikan replikasi tidak memasukkan variabel pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Dengan pertimbangan bahwa penelitian Zuliarti (2008) telah secara spesifik meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ada kemungkinan pengaruh ini juga terjadi dalam penerapan pelaporan keuangan pada Polda Jambi dengan menambah variabel Good Corporate Governance. Alasan lain Polda Jambi dipilih sebagai objek penelitian karena Polda Jambi ini telah menerapkan

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang mengacu pada PP71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan, maupun individu, didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Polda Jambi adalah entitas akuntansi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, Pengendalian intern akuntansi dan Good Corporate Governance terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah (studi empiris pada 32 Satuan Kerja di Polda Jambi).

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah Khususnya pada 32 Satker di Polda Jambi.
2. Mengetahui kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama apakah berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Khususnya pada 32 Satker di Polda Jambi.
3. Mengetahui kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan *Good Corporate Governance* secara partial berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah Khususnya pada 32 Satker di Polda Jambi.
4. Mengetahui kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan *Good*

Corporate Governance secara partial apakah berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Khususnya pada 32 Satker di Polda Jambi.

2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Faristina, (2011), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Septiani, 2005 dalam Faristiana, 2011).

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Faristina, 2011).

2.2 Agency Theory (Teori Keagenan)

Agency theory dikenal hubungan keagenan yang merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam Faristina, 2011).

Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya (Faristina, 2011).

2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen utama suatu organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya seperti Modal, teknologi dan uang sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintahan seperti perubahan-perubahan lingkungan bisnis, lingkungan kerja, menghendaki perusahaan/organisasi harus melakukan pengembangan sumberdaya manusia secara pro aktif sehingga tidak terjadi kekusangan kemampuan pegawai dan juga untuk meningkatkan produktivitas.

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil celvina (2010).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab

dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan Hevesi, (2005). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan Hevesi, (2005) dalam Desi dan Ertambang, (2008). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Organisasi harus juga berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka. Pelatihan dan pengembangan membuat karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka saat ini secara efektif dan mempersiapkan pekerjaan di masa mendatang. Penilaian kinerja adalah penting untuk memvalidasi alat pemilihan, mengukur dampak dari program pelatihan, memutuskan kenaikan gaji dan promosi, dan menentukan kebutuhan akan pelatihan Griffin, (2004).

2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan apabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi dalam arti lain pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data. Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak

dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak Pujonggo,(2004).

Menurut model yang dikembangkan Thompson et al. (1991) dalam Tjhai (2003) yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Trandis (1980), dalam Astuti dan I ketut (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi :

1. Faktor sosial
2. *Affect* (perasaan individu)
3. Kesesuaian tugas
4. Konsekuensi jangka panjang
5. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi
6. Kompleksitas

2.5 Pengendalian Intern Akuntansi

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP. 60 tahun 2008 SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.6 Good Corporate Governance

Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasar pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi terciptanya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus membaik seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Tujuan dari *Good Corporate Governance* (Amin Widjaja Tunggal 2011) adalah

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik

3. Perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat
4. Kegiatan-kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan.

Manfaat penerapan *good corporate governance* dalam pedoman *Good Corporate Governance* (2006:2) adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan perusahaan.
2. Memberikan keyakinan bahwa perusahaan dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan hasil yang wajar dan bernilai tinggi sehingga memiliki daya saing dan daya tahan yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
3. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
4. Mendorong pengelolaan resiko dan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif.
5. Mendorong agar setiap unsur pimpinan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perusahaan terhadap stakeholders.
6. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
7. Mencegah terjadinya pengimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Prinsip – Prinsip dalam *Good Corporate Governance* Menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:34) Dalam pelaksanaan Praktik pelaksanaan *good corporate governance* dikenal adanya 4 (empat) prinsip utama yaitu :

1. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
Paradigma para pengelola perusahaan dewasa ini hanya terbatas pada motif mengejar laba. Kondisi ini membuat mereka lupa bahwa sebagian dari suatu komunitas, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu *corporate governance* menawarkan konsep *triple bottom line* yaitu: mengejar laba, memenuhi tanggung jawab sosial, dan menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable*).
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
Dalam sebuah perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh publik, peran pemegang saham sebagai pihak yang mengendalikan manajemen hampir tidak ada. Hal ini disebabkan karena para investor lebih suka berperan sebagai *traders* dibandingkan

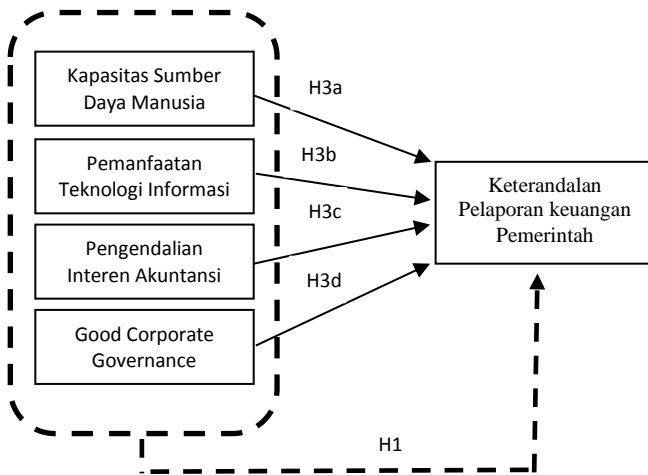
sebagai owners. Jika pemegang saham tidak menyukai kebijakan manajemen mereka tinggal melepas saham yang mereka miliki demikian juga sebaliknya. Akhirnya indikator kinerja manajemen hanya diukur dengan naik turunnya saham. Masalah akan timbul jika ketidaksetujuan sebagian besar pemegang saham direalisasikan dengan aksi jual. Harga saham akan turun dengan drastis dan dalam waktu yang tidak lama lagi perusahaan akan bangkrut. Untuk itu *corporate governance* menganjurkan perlunya suatu sistem yang menjamin agar manajemen tetap menjaga akuntabilitas kepada *stakeholders*.

3. Keadilan (*Fairnes*)
Prinsip *fairnes* menuntut adanya perlakuan yang sama (*equal*) terhadap para pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Dalam praktiknya, prinsip ini sering dilanggar, terutama dalam kasus pengambilalihan perusahaan. Kasus yang sering terjadi adalah keberpihakan manajemen kepada kelompok pemegang saham, biasanya pemegang saham mayoritas. Hal ini dapat terjadi karena baik dewan komisaris maupun dewan direksi didominasi oleh para pemegang saham dan kelurganya. Jadi prinsip ini menuntut agar dewan komisaris dan dewan direksi bekerja secara independen dan profesional.
4. Transparansi (*Transparancy*)
Transparan berarti tidak ada yang disembunyikan. Transparansi dapat dimulai dengan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sistem penggajian eksekutif dan komisaris diperusahaan sampai dengan informasi-informasi lain yang relevan dipasar modal.

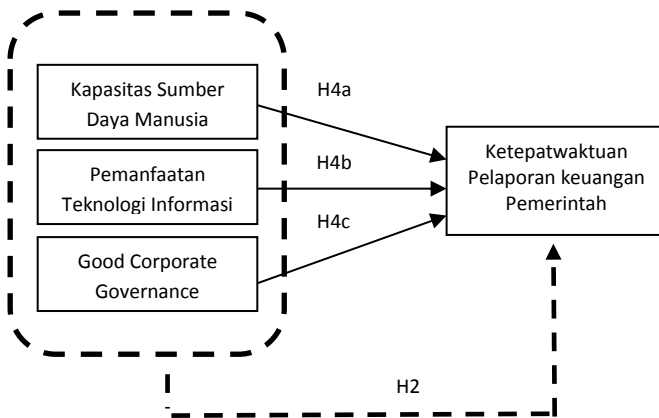
2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka konseptual yang dibangun dalam penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan tentang penelitian yang akan dilakukan penulis secara keseluruhan, yaitu menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan Good Corporate Governance terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah pada 32 Satuan Kerja pada di Polda Jambi.

Secara umum penelitian ini menganalisis variabel kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian intern Akuntansi dan Good Corporate Governance terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah daerah dan ketepatanwaktuan pelaporan Keuangan Pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari model berikut :



Gambar 1.
MODEL PERTAMA PENGARUH VARIABEL INDEPENDEN TERHADAP VARIABEL DEPENDEN



Gambar 2.
MODEL KEDUA PENGARUH VARIABEL INDEPENDEN TERHADAP VARIABEL DEPENDEN

Model Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan *Good Corporate Governance* terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah.

2.3 Hipotesis Penelitian

Adapun Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam 2 (dua bagian), yaitu pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

2.3.1 Pengaruh simultan

H1 : Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian interen akuntansi, dan *Good*

Corporate Governance secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

H2 : Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

2.3.2 Pengaruh Partial

H3a : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

H4a : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

H3b : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah

H4b : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

H3c : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah.

H3d : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

H4c : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

3. METODOLOGI

3.1 Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 32 satuan kerja yang ada di wilayah kerja kepolisian daerah Jambi. Variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah Keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan variabel Y. Sedangkan kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi, pengendalian interen akuntansi dan *Good Corporate Governance* merupakan variabel X. Masing-masing variabel dalam penelitian ini diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Urusan Keuangan/Kepala Seksi Keuangan, bagian akuntansi/penatausahaan keuangan staf pengelola keuangan/pemegang kas pada Satuan kerja Polda Jambi.

Penyampelan atas responden dilakukan secara purposive sampling. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria

yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada Satuan Kerja.
- b. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga tiap Satuan Kerja ditetapkan secara *cluster sampling* sebanyak 3 orang yang menjadi responden.
- c. Responden ditetapkan pada kepala bagian, staf pencatatan keuangan/akuntansi dan staf pemegang kas Satuan Kerja.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan staf bagian keuangan/akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan Satuan Kerja dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah Khususnya Polda Jambi. Penentuan responden dengan jumlah 96 untuk 32 Satuan Kerja dengan masing-masing tiap Satuan Kerja 3 responden didasarkan pada alasan :

- a. Maksimal 3 responden pada tiap Satuan Kerja supaya unit analisis bersifat heterogen dan persepsi responden dapat menyebar secara merata di Satuan Kerja.
- b. Penentuan 3 responden pada tiap Satuan Kerja karena hanya akan melihat persepsi kepala bagian, bagian pencatatan/akuntansi dan pemegang kas.
- c. Penentuan 3 responden pada tiap Satuan Kerja didasarkan pada asumsi bahwa persepsi kepala bagian, bagian pencatatan/akuntansi dan pemegang kas yang mengetahui secara pasti mengenai pelaporan keuangan pada tiap Satuan Kerja.

3.2 Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian survey yang merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap beberapa anggota sampel dari suatu populasi tertentu yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner (Sekaran, 2003). Jenis penelitian adalah deskriptif atau survey deskriptif untuk menggambarkan mengapa fenomena itu terjadi yang bertujuan untuk memberi gambaran (deskripsi) dari variabel-variabel yang diteliti dan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis. Data penelitian adalah data primer yang dikumpulkan dengan mailed survey method dan direct survey method.

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti.

3.3 Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independent yang terdiri dari kapasitas SDM (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pengendalian internal akuntansi (X3) dan Good Corporate Governance (X4) serta 2 (dua) variabel dependent yaitu keterandalan (Y1) dan ketepatanwaktuan (Y2) yang dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Konstruk Kapasitas Sumber Daya Manusia diukur dengan indikator:

- a) Kapasitas Staf; merupakan standarisasi kapasitas staf bagian keuangan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
- b) Tupoksi; merupakan uraian peran dan fungsi yang jelas bagi seorang staf bagian keuangan/akuntansi yang ditunjang dengan sistem dan prosedur yang jelas.
- c) Pengembangan; merupakan upaya penguasaan dan pengembangan keahlian staf, baik formal maupun non-formal.

Kualitas sumber daya manusia yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) adalah Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. (Jurnali dan Supomo (2002)). Konstruk Pemanfaatan teknologi Informasi diukur dengan indikator:

- a) Perangkat; merupakan indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, keras dan sistem jaringan.
- b) Pengelolaan Data Keuangan; merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan secara sistematis dan menyeluruh.
- c) Perawatan; merupakan indikator untuk menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur terhadap perangkat teknologi informasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

3. Pengendalian Intern Akuntansi (X3) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP. No. 60 tahun 2008). Konstruk Pengendalian Intern Akuntansi diukur dengan indikator formatif:
- Lingkungan pengendalian; merupakan upaya untuk meningkatkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.
 - Penilaian risiko; merupakan upaya untuk mengidentifikasi risiko dan menganalisis risiko yang akan terjadi pada organisasi sektor publik.
 - Kegiatan pengendalian; merupakan upaya untuk melakukan review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan termasuk di dalamnya adalah pemisahan tugas.
 - Informasi dan komunikasi; merupakan upaya untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
 - Pemantauan pengendalian intern; merupakan upaya pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.
4. Good Corporate Governance (X4) adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan nilai organisasi. Untuk mengukur variabel independen tersebut dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada para responden yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*corporate governance*) menurut CGCG (2009:71) yang terdiri dari lima aspek sebagai berikut:
- Transparansi
 - Akuntabilitas
 - Ketanggapan
 - Independen
 - Keadilaan
5. Keterandalan laporan keuangan (Y1) adalah Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. (PP No. 24 Tahun 2005). Konstruk Nilai Informasi Keterandalan diukur dengan indikator:
- Kewajaran; merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa transaksi serta peristiwa lainnya yang disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
 - Kelengkapan unsur Laporan Keuangan; merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa unsur-unsur laporan keuangan disajikan secara lengkap sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri.
 - Dapat diuji; merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji kebenarannya, baik metodologi maupun bukti-bukti transaksi.
 - Generalisasi; merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
6. Ketepatanwaktuan laporan keuangan (Y2) adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. (PP No. 24 Tahun 2005). Konstruk nilai informasi ketepatanwaktuan diukur dengan indikator:
- Timelines; merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.
 - Sistematis waktu; merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa laporan-laporan disediakan secara sistematis dan teratur, misal: laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan.
 - Sistematis unsur; merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur antara unsur-unsur laporan keuangan, yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner yang diantar langsung ke 32 Satuan Kerja di Polda jambi dengan responden sebanyak 96. Jumlah kuesioner yang kembali hanya diperoleh 80 lembar kuesioner. Tabel di bawah ini menunjukkan rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner. Tabel tersebut juga menginformasikan tingkat pengembalian (*response rate*).

Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung dengan batas pengambilan 2 – 3 minggu setelah pembagian kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 80 dimana semuanya dapat digunakan. Tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) dan dapat digunakan (*respon use*) sebesar 83%, dihitung dari presentase jumlah kuesioner yang kembali (80 kuesioner) dibagi total yang dikirim (96 kuesioner). Gambaran tentang profil responden dalam penelitian ini ditunjukkan

dalam tabel 4.2 di bawah ini. Profil responden tersebut meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan waktu lama bekerja.

4.1 Uji Multikolinearitas Regresi pertama

Tabel. 1
Hasil Pengujian Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	21,251	5,901	3,601	,001		
	Kapasitas SDM	-,054	,100	-,545	,587	,951	1,051
	Pemanfaatan TI	,057	,110	,060	,516	,608	1,029
	Pengendalian Intern Akuntansi	-,080	,114	-,080	-,698	,487	1,024
	Good Corporate Governance	,153	,149	,120	1,027	,308	1,054

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Akuntansi

Sumber: diolah oleh Peneliti

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *VIF* < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.2 Uji Multikolinearitas Regresi Kedua

Tabel. 2
Hasil Pengujian Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,348	3,104	3,333	,001		
	TOTAL_KSDM	-,030	,060	-,504	,616	,951	1,051
	TOTAL_PTI	,017	,066	,029	,254	,800	1,028
	TOTAL_GCG	-,052	,088	-,069	-,591	,556	1,032

a. Dependent Variable: TOTAL_KTWT

Sumber: diolah oleh Peneliti

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih 0,10. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation*

Factor (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *VIF* < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

4.3 Uji t (Regresi Parsial) Model Pertama

Tabel. 3
Hasil Analisis Parsial Model Pertama

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	α = 5%	Ket.
Kapasitas SDM	0,545	1,99210	0,587	0,05	Tidak Signifikan
Pemanfaatan TI	2,516	1,99210	0,008	0,05	Signifikan
Pengendalian Intern Akuntansi	2,698	1,99210	0,047	0,05	Signifikan
Good Corporate Governance	2,207	1,99210	0,038	0,05	Signifikan

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel 4.16 tampak bahwa nilai *t_{hitung}* lebih besar dari *t_{tabel}* sebesar (*t_{hitung}* > 1,99210) (*df* = *n* - 5) dengan angka signifikansi < α = 0,05. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan *Good Corporate Governance* secara partial berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, kecuali kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

4.4 Uji t (Regresi Parsial) Model Kedua

Tabel. 4
Hasil Analisis Parsial Model Kedua

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	α = 5%	Ket.
Kapasitas SDM	2,504	1,99167	0,016	0,05	Signifikan
Pemanfaatan TI	2,254	1,99167	0,038	0,05	Signifikan
Good Corporate Governance	2,591	1,99167	0,006	0,05	Signifikan

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel 4.17 tampak bahwa nilai *t_{hitung}* lebih besar dari *t_{tabel}* sebesar (*t_{hitung}* > 1,99167) (*df* = *n* - 4) dengan angka signifikansi < α = 0,05. Hal ini berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan *Good Corporate Governance* secara partial berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

4.5 Pengujian Hipotesis Model Pertama

4.5.1 Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Tabel. 5
Analisis Regresi Berganda Pertama

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	21,251	5,901		3,601	,001
Kapasitas SDM	,054	,100	,064	,545	,587
1 Pemanfaatan TI	,057	,110	,060	2,516	,008
Pengendalian Intern Akuntansi	,080	,114	,080	2,698	,047
Good Corporate Governance	,153	,149	,120	2,027	,038

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien regresi kualitas SDM sebesar 0,054. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi kualitas SDM adalah $0,587 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga a (H3a) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah khususnya di 32 Satker di Polda Jambi (**Hipotesis ditolak**)

4.5.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Tabel. 6
Analisis Regresi Berganda Pertama

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	21,251	5,901		3,601	,001
Kapasitas SDM	,054	,100	,064	,545	,587
1 Pemanfaatan TI	,057	,110	,060	2,516	,008
Pengendalian Intern Akuntansi	,080	,114	,080	2,698	,047
Good Corporate Governance	,153	,149	,120	2,027	,038

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi 0,057. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi adalah $0,008 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan

demikian, hipotesis ketiga b (H3b) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah khususnya di 32 Satker di Polda Jambi (**Hipotesis diterima**).

4.5.3 Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Tabel. 7
Analisis Regresi Berganda Pertama

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	21,251	5,901		3,601	,001
Kapasitas SDM	,054	,100	,064	,545	,587
1 Pemanfaatan TI	,057	,110	,060	2,516	,008
Pengendalian Intern Akuntansi	,080	,114	,080	2,698	,047
Good Corporate Governance	,153	,149	,120	2,027	,038

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien regresi pengendalian intern akuntansi 0,080. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pengendalian intern akuntansi adalah $0,047 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga c (H3c) yang menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah khususnya di 32 Satker di Polda Jambi (**Hipotesis diterima**).

4.5.4 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Tabel. 8
Analisis Regresi Berganda Pertama

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	21,251	5,901		3,601	,001
Kapasitas SDM	,054	,100	,064	,545	,587
1 Pemanfaatan TI	,057	,110	,060	2,516	,008
Pengendalian Intern Akuntansi	,080	,114	,080	2,698	,047
Good Corporate Governance	,153	,149	,120	2,027	,038

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien regresi *Good Corporate Governance* 0,153. Hal ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi *Good Corporate Governance* adalah $0,038 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga c (H3d) yang menyatakan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah khususnya di 32 Satker di Polda Jambi (**Hipotesis diterima**).

4.6 Pengujian Hipotesis Model Kedua

Untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan maka digunakan uji parsial (menguji individual variabel bebas terhadap variabel terikat).

4.6.1 Pengaruh Kapasitas SDM terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Tabel. 9
Analisis Regresi Berganda Kedua
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,348	3,104		3,333	,001
Kapasitas SDM	,030	,060	,059	2,504	,016
1 Pemanfaatan TI	,017	,066	,029	2,254	,038
<i>Good Corporate Governance</i>	,052	,088	,069	2,591	,006

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien regresi kualitas SDM sebesar 0,030. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi kualitas SDM adalah $0,016 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis keempat a (H4a) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah khususnya di 32 Satker di Polda Jambi (**Hipotesis diterima**).

4.6.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Tabel. 10
Analisis Regresi Berganda Kedua
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,348	3,104		3,333	,001
Kapasitas SDM	,030	,060	,059	2,504	,016
1 Pemanfaatan TI	,017	,066	,029	2,254	,038
<i>Good Corporate Governance</i>	,052	,088	,069	2,591	,006

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi adalah $0,038 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis keempat b (H4b) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah khususnya di 32 Satker di Polda Jambi (**Hipotesis diterima**).

4.6.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan

Tabel. 11
Analisis Regresi Berganda Kedua
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,348	3,104		3,333	,001
Kapasitas SDM	,030	,060	,059	2,504	,016
1 Pemanfaatan TI	,017	,066	,029	2,254	,038
<i>Good Corporate Governance</i>	,052	,088	,069	2,591	,006

a. Dependent Variable: Keterandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien regresi *Good Corporate Governance* 0,052. Hal ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi *Good Corporate Governance* adalah $0,006 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis keempat c (H4c) yang menyatakan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan

pemerintah Khususnya di 32 Satker di Polda Jambi (**Hipotesis diterima**).

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI, pengendalian intern akuntansi, dan *Good Corporate Governance* terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah khususnya pada 32 Satker di Polda Jambi. Untuk meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan, maka Polda Jambi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama.
2. Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah khususnya pada 32 Satker di Polda Jambi. Untuk meningkatkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, maka Polda Jambi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan *Good Corporate Governance* secara bersama-sama.
3. Pengaruh secara parsial keterandalan laporan keuangan :
 - a. Kapasitas SDM tidak berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah pada 32 satuan kerja di Polda Jambi.
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah pada 32 satuan kerja di Polda Jambi.
 - c. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah pada 32 satuan kerja di Polda Jambi.
 - d. *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah pada 32 satuan kerja di Polda Jambi.

4. Pengaruh secara parsial ketepatanwaktuan laporan keuangan:
 - a. Kapasitas SDM berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah pada 32 satuan kerja di Polda Jambi.
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah pada 32 satuan kerja di Polda Jambi.
 - c. *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah pada 32 satuan kerja di Polda Jambi.

5.2 Keterbatasan

1. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden.
2. Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah pada 32 satuan kerja di Polda Jambi yang digunakan dalam penelitian ini hanya 2 proksi saja yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan.
3. Perbedaan signifikansi yang cukup tinggi antara pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan. Boleh jadi temuan ini memberikan dukungan mengenai saling korban (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keterandalan untuk mendapatkan kebermanfaatan. Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keterandalan.

5.3 Saran

1. Melengkapi metoda survai dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada, sert mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasanya jawaban responden.
2. Menambah proksi variabel dependen lain yang terkait dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah seperti dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
3. Penelitian selanjutnya dapat juga meneliti mengenai hubungan keterandalan dan ketepatanwaktuan karena antara keterandalan dan

ketepatanwaktuan sendiri sering kali terjadi *trade-off*. Hal ini mendukung secara empirik studi yang dilakukan oleh Santiadji, dkk (2010).

DAFTAR REFERENSI

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*.
- Arfianti 2011 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum” (Studi Pada Blu Di Kota Semarang).
- Alimbudiono, Ria Sandra dan Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Celviana Windiyaningrum, 2010 pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi
- Dinata, Anton Mulhar. 2004. Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya Good Governance di Era Otonomi Daerah. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya
- Dhany Apriansyah 2010 Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota Bengkulu).
- Desi Indriasari, Ertambang Nahartyo. 2009. *Pengaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir*. *Jurnal Akuntansi*
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. Yogyakarta : BPF.
- Faristina Rosalin. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang*. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government. Norwalk.
- Hamzah, Ardi. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. www.osc.state.ny.us
- Hilmi, Utari dan Syaiful Ali. 2008. ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di BEJ)”. *Symposium Nasional Akuntansi XI Ikatan Akuntan Indonesia*
- Imam Ghozali. 2001. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Imam Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP
- Jasen, M dan W, Meckling 1976. Theory of the Firm : managerial behavior, Agency and Ownership Structure *Journal Of Financial Economic*.
- Jurnali, T. & Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No. 2

- [http://www.bpkp.go.id/konten/419/Akuntabilitas-Pelaporan Keuangan.bpkp\)](http://www.bpkp.go.id/konten/419/Akuntabilitas-Pelaporan%20Keuangan.bpkp)
- [http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/06/lmd04q-duh-laporan-keuangan-kementerian-banyak-yang-bermasalah\).](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/06/lmd04q-duh-laporan-keuangan-kementerian-banyak-yang-bermasalah)
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. UPP STIM YKPN.
- Michael C. Jensen, William H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economic*. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360
- Noviyanti, Suzy & Intiyas Utami. 2004. *Dasar-dasar Pengauditan*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- Rini Suryani. 2013. *Pengaruh Penerapan prinsip – prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan*. Bandung.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
- , Undang-Undang APBN Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- , peraturan pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah
- , Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 65 / PB / 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- , Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 57 / PB / 20130 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50- 66.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- YPPMI Institut dan FCGI. 2002. *Good Corporate Governance dalam Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. YPPMI *Sinergy Communication*

